

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumarsono dkk. (2017) dalam bukunya menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya, serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam membuka lapangan kerja baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Sumarsono et al., 2017).

Harapannya permintaan tenaga kerja bisa lebih besar dengan terbukanya banyak lapangan sehingga penawaran kerja dapat terserap secara maksimal. Ekuilibrium pasar kerja terjadi ketika garis penawaran berada pada titik yang sama dengan permintaan tenaga kerja. Pada titik yang sama tersebut, tidak ada pengangguran atau apa yang dikenal sebagai *full employment*. Namun, kenyataannya pengangguran masih ditemukan, sehingga keadaan *full employment* tidak akan mungkin terjadi.

Menurut Elfindri dkk (2019) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan Daerah, menyebutkan beberapa alasan menganggur, seperti mengharapkan pekerjaan resmi dengan gaji tetap, memiliki pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan jasa, dan dalam beberapa kasus, biaya mencari pekerjaan mahal (Elfindri et al., 2019).

Faktor yang mempengaruhi pengangguran salah satunya adalah pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia secara fisik dan mental seiring dengan pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebut dengan pembangunan manusia. Berarti peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memberi lebih banyak peluang untuk berkontribusi pada proses pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik Indonesia mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menjadikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator penting yang melingkupi 3 hal dasar. Kualitas SDM dapat meningkat dengan menjadikan pendidikan sebagai salah satu investasi, ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan individu yang mengalami kemajuan, sehingga produktivitas kerja meningkat. Kesempatan kerja yang lebih besar merupakan dampak dari produktivitas yang meningkat, peningkatan tersebut akan mengakibatkan biaya produksi per unit barang menurun, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan harga per unit barang yang ditawarkan. Permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat jika harga barang turun, kemudian pengusaha jadi terdorong untuk menambah pekerja, sehingga mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahroji dan Nurkhasanah (2019), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (2023) menyebutkan bahwa ada empat tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah pengangguran dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan, yang terdiri dari 2,8 juta orang, atau 33,45% dari total 8,4 juta pengangguran. Selain itu, sekitar 76,90% dari 2,8 juta pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan memiliki pendidikan yang rendah (lulusan SMP ke bawah). Pengangguran tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat pendidikannya yang rendah dan kompetensinya yang tidak sesuai dengan lapangan kerja. Kedua, ada tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama di sektor formal. Ketiga, generasi Y dan Z membawa standar baru ke budaya kerja, seperti keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Keempat, risiko ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan disebabkan oleh digitalisasi. Digitalisasi mengubah pola hubungan kerja, persyaratan keterampilan kerja, dan fleksibilitas waktu dan tempat kerja (Biro Humas Kemnaker, 2023).

Bisa dilihat bahwa Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam menurunkan pengangguran adalah *hopeless of job* yang mana sebagian besar pengangguran memiliki pendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah). Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat masih terdapatnya masyarakat dengan pendidikan yang rendah pada Kabupaten Bekasi yang mana rata-rata lama sekolah hanya mencapai 9,5 tahun atau artinya sampai SMP saja, padahal pemerintah pusat sudah mengamanatkan wajib belajar yang di tempuh oleh siswa adalah 12 tahun. Menurut Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan (2022) ada beberapa alasan mengapa masyarakat hanya sampai SMP. Pertama, pendidikan menengah dan kejuruan dimiliki oleh pemerintah provinsi, sehingga tanggung jawab pemerintah kabupaten terbatas. Kedua, jumlah guru dan sarana sekolah terbatas sehingga tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Akibatnya, sekolah swasta muncul untuk mengisi ruang kosong ini, yang tentunya membutuhkan biaya. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakannya adalah bekerja sama dengan pemerintah tingkat provinsi untuk mengupayakan peningkatan sarana. Dani Ramdan mengakui bahwa masalah rata-rata lama sekolah yang rendah tentunya berdampak pada indeks pembangunan manusia dan menyebabkan peningkatan angka pengangguran (Andryandy, 2022).

Selain itu, Kabupaten Karawang, yang merupakan wilayah industri dengan UMK tertinggi di Indonesia, mengalami peningkatan pengangguran yang signifikan. Berdasarkan data dari UPTD Dinas Pendidikan Wilayah 2 dan juga aplikasi lowongan kerja milik pemerintah kabupaten, angka pencari kerja di Karawang mencapai 26 ribu namun tenaga kerja yang terserap hanya 9 ribu orang. Hal ini terjadi karena kurikulum pada sekolah yang ditempuh oleh pencari kerja berbeda dengan kebutuhan industri. Akibatnya, perlu ada kerja sama antara industri dengan sekolah (Maulana, 2022).

Menurut Gatningsih & Sutrisno (2017) dalam modul mata kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyebutkan beberapa faktor dapat menyebabkan pengangguran, seperti penurunan output serta pengeluaran total, ketidakseimbangan antara permintaan serta penawaran tenaga kerja, durasi

pencarian pekerjaan yang membutuhkan waktu tidak sebentar, dan kemajuan teknologi (Gatiningsih & Sutrisno, 2017). Salah satu indikator dalam dimensi standar hidup layak pada indeks pembangunan manusia adalah pengeluaran total, yang diperoleh dari Produk Nasional Bruto (PNB).

Selain pembangunan manusia, pengangguran juga dipengaruhi oleh upah minimum. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan upah minimum, yang menandai awal intervensi pemerintah dalam penentuan tingkat upah. Upah minimum ditetapkan dengan asumsi bahwa itu adalah langkah pertama menuju pencapaian penghasilan yang layak untuk kesejahteraan pekerja, sehingga pekerja dapat fokus pada kemajuan dan produktivitas perusahaan.

Namun, ada dua perspektif berbeda tentang upah minimum. Pengusaha, sebagai pihak yang mengeluarkan upah, menentang kenaikan upah minimum setiap tahun karena mereka menganggapnya sebagai beban bagi bisnis. Sedangkan, dari perspektif pekerja masalah yang muncul adalah ketidakpatuhan pengusaha terhadap ketentuan upah minimum. Ketika perusahaan menyesuaikan peningkatan upah minimum dengan harus menaikkan biaya produksinya, perusahaan berusaha untuk memangkas jumlah tenaga kerja, dan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan penelitian Grace Lordan (2019) melihat bahwa kenaikan upah minimum secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan otomatis yang tersedia untuk pekerja dengan keterampilan rendah dan gaji rendah setelah kenaikan upah minimum, tetapi dampak ini kecil (Lordan, 2019).

Sejalan dengan penelitian Soeharjoto & Oktavia (2021) yang menyatakan bahwa pihak pemberi kerja memandang upah harus dikeluarkan sebagai salah satu biaya produksi, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya tenaga kerja, sebaliknya pekerja memandang upah sebagai penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Biaya produksi lebih tinggi disebabkan oleh tuntutan pekerja yang meningkat untuk mendapatkan kenaikan upah, sehingga meningkatkan harga produk dan menurunkan permintaan konsumen, yang pada akhirnya akan menyebabkan

perusahaan memangkas tenaga kerja untuk bertahan dan efisien di pasar (Soeharjoto & Oktavia, 2021).

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Helvira & Rizki (2022) menyatakan upah yang berlaku di sebuah wilayah dapat berdampak baik atau buruk. Dampak positifnya adalah pengangguran berkurang karena peningkatan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, dampak negatifnya adalah upah yang meningkat menyebabkan penurunan tenaga kerja karena perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka. Hasil penelitian ini secara parsial upah minimum signifikan memengaruhi pengangguran terbuka (Helvira & Rizki, 2020).

Tabel 1. 1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2018-2021

Provinsi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
ACEH	6.34	6.17	6.59	6.3
SUMATERA UTARA	5.55	5.39	6.91	6.33
SUMATERA BARAT	5.66	5.38	6.88	6.52
RIAU	5.98	5.76	6.32	4.42
JAMBI	3.73	4.06	5.13	5.09
SUMATERA SELATAN	4.27	4.53	5.51	4.98
BENGKULU	3.35	3.26	4.07	3.65
LAMPUNG	4.04	4.03	4.67	4.69
KEP. BANGKA BELITUNG	3.61	3.58	5.25	5.03
KEP. RIAU	8.04	7.5	10.34	9.91
DKI JAKARTA	6.65	6.54	10.95	8.5
JAWA BARAT	8.23	8.04	10.46	9.82
JAWA TENGAH	4.47	4.44	6.48	5.95
DI YOGYAKARTA	3.37	3.18	4.57	4.56
JAWA TIMUR	3.91	3.82	5.84	5.74
BANTEN	8.47	8.11	10.64	8.98
BALI	1.4	1.57	5.63	5.37
NUSA TENGGARA BARAT	3.58	3.28	4.22	3.01
NUSA TENGGARA TIMUR	2.85	3.14	4.28	3.77
KALIMANTAN BARAT	4.18	4.35	5.81	5.82
KALIMANTAN TENGAH	3.91	4.04	4.58	4.53
KALIMANTAN SELATAN	4.35	4.18	4.74	4.95
KALIMANTAN TIMUR	6.41	5.94	6.87	6.83
KALIMANTAN UTARA	5.11	4.49	4.97	4.58

SULAWESI UTARA	6.61	6.01	7.37	7.06
SULAWESI TENGAH	3.37	3.11	3.77	3.75
SULAWESI SELATAN	4.94	4.62	6.31	5.72
SULAWESI TENGGARA	3.19	3.52	4.58	3.92
GORONTALO	3.7	3.76	4.28	3.01
SULAWESI BARAT	3.01	2.98	3.32	3.13
MALUKU	6.95	6.69	7.57	6.93
MALUKU UTARA	4.63	4.81	5.15	4.71
PAPUA BARAT	6.45	6.43	6.8	5.84
PAPUA	3	3.51	4.28	3.33

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2024)

Data diatas memperlihatkan masih terdapat pengangguran di Indonesia yang mana persentasenya mengalami kenaikan maupun penurunan pada masing-masing provinsi di setiap tahunnya. Kenaikan pada tingkat persentase pengangguran tertinggi berada di tahun 2020, jika diurutkan lima provinsi dengan tingkat kenaikan tertinggi maka urutan yang pertama yaitu Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2019, urutan ke lima dalam tingkat pengangguran terbuka adalah DKI Jakarta yang memiliki persentase 6.54% lalu mengalami kenaikan sebesar 4.41%, sehingga pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kesatu dengan tingkat pengangguran terbuka 10.95%.

Kedua adalah Provinsi Bali, pada tahun 2019 Provinsi Bali memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah dari semua provinsi yaitu 1.57%, namun dengan adanya kenaikan sebesar 4.06%, persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali menjadi 5.63% dan meningkat yang sebelumnya berada di urutan paling rendah menjadi urutan ke 17 pada tingkat pengangguran terbuka tahun 2020. Pada urutan ketiga yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat persentase 7.5% pada tahun 2019 lalu mengalami kenaikan sebesar 2.84%, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi 10.34% pada tahun 2020.

Keempat adalah Provinsi Banten, pada tahun 2019 Provinsi Banten memiliki tingkat persentase 8.11% lalu mengalami kenaikan sebesar 2.53%, sehingga pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka menjadi 10.64%.

Kelima adalah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat persentase 8.04% lalu mengalami kenaikan sebesar 2.42%, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi 10.46% pada tahun 2020.

Fenomena Covid-19 pada seluruh dunia yang baru dialami pada awal tahun 2020 mengakibatkan sebagian sistem perekonomian terhenti dan perubahan pola aktivitas manusia dalam berkegiatan di luar rumah. Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah wabah virus yang menyebar di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan dunia menghadapi krisis sosial ekonomi dan krisis kesehatan global. Untuk mencegah penyebaran virus, pembatasan sosial dan penutupan lokasi seperti sekolah dan kantor harus dilakukan. Karena hal itu terjadi, para pekerja harus dirumahkan karena bisnis tidak bisa berjalan seperti biasanya. Hal ini juga menyebabkan penurunan daya beli di beberapa sektor karena masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang-barang kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), terdapat 29,12 juta penduduk atau senilai 14.28% usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran senilai 2,56 juta penduduk. Kedua, Bukan Angkatan Kerja (BAK) senilai 0,76 juta penduduk. Ketiga, sementara tidak bekerja senilai 1,77 juta penduduk. Dan keempat, pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja senilai 24,03 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020). Dapat kita lihat bahwa dampak pada ketenagakerjaan di Indonesia karena pandemi Covid-19 diantaranya adalah tingkat pengangguran terbuka yang meningkat di tahun 2020 berdasarkan tabel data tingkat pengangguran terbuka dari BPS pada lembar sebelumnya.

Berlandaskan pemaparan tersebut, judul “Pengaruh Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Barat” peneliti jadikan sebagai judul penelitian dengan mengambil rentang waktu di tahun 2018-2021 yang mana mulai dari tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang dijadikan sebagai variabel dummy oleh peneliti. Serta, peneliti memilih daerah Provinsi Jawa Barat untuk diteliti, karena di Indonesia

berada di urutan kedua dalam tingkat pengangguran dan di urutan kelima dalam kenaikan tingkat pengangguran tertinggi saat dimulainya pandemi Covid-19.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembangunan manusia terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021?
3. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021?
4. Bagaimana pengaruh pembangunan manusia, upah minimum, dan pandemi Covid-19 secara bersama-sama terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh antara pembangunan manusia terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021.
2. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh antara upah minimum terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021.
3. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh antara pandemi Covid-19 terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021.
4. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh antara pembangunan manusia, upah minimum, dan pandemi Covid-19 secara bersama-sama terhadap pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya seputar pembangunan manusia, upah minimum, pandemi Covid-19 dan pengangguran baik bagi peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk merepresentasikan teori yang didapatkan saat menempuh pembelajaran di kuliah serta berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam membuat karya ilmiah.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat berguna dalam melihat perkembangan pengangguran di Jawa Barat tahun 2018-2021.

c) Bagi Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah untuk akademisi di Universitas Negeri Jakarta serta menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan.